

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Kristina Eti, Septina Dwi Rahmawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

E-mail: kristinaeti04@gmail.com

Abstrak: Perubahan system paradigma menjadikan masyarakat Desa semakin sadar akan kinerja pemerintah desa. mulai dari pemerintahan daerah sampai pemerintah terkecil yaitu desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. analisis informan menggunakan Purposive Sampling. Data yang digunakan teknik analisis adalah proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. hasil data ini menggunakan teknik triangulasi. penelitian menyimpulkan bahwa Pengelolaan ADD. Dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Gunungsari cukup baik, berdasarkan perspektif pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dilihat dari proses pelaporan serta tanggung jawab yang mengalami keterlambatan pembangunan.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract: The change in paradigm system has made the village community more aware of the performance of the village government. starting from the local government to the smallest government, namely the village. This study uses qualitative methods, by way of interviews, observations, and documentation. informant analysis using purposive sampling. The data used in the analysis technique is the process of data reduction, presentation, and drawing conclusions. the results of this data use triangulation techniques. the study concluded that the Management of ADD. In improving village development in Gunungsari Village, it is quite good, based on the perspective of ADD management carried out by the Village Government following the rules of technical guidance stipulated in the law. This is seen from the reporting process and the responsibilities that have been delayed in development.

Keywords: Management of Village Fund Allocation, Village Development

PENDAHULUAN

Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi membuat masyarakat desa semakin sadar akan kinerja pemerintah (*public sector*), mulai dari pemerintah pusat hingga desa Gunungsari. Berakhirnya rezim pemerintahan order baru dalam meningkatkan masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dalam meningkatkan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat pemerintahan, dalam hal

tersebut semakin diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah desa dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Petimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dua undang-undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap masing-masing daerah untuk mengembangkan potensinya.

Menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa (Faridah dan Suryono. 2015). Menjelaskan Peraturan Daerah Batu Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 60% yang di bagi secara merata kepada seluruh desa Gunungsari yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, dan biaya perjalanan dinas daerah pemerintahan desa. Sedangkan 40% penggunaan ADD di bagi merata secara proporsional dari desa masing masing untuk meperdayakan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penggunaan ADD, dalam meningkatkan masyarakat desa Dan perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa Gunungsari agar pelaksanaan dapat sesuai dengan tujuan dan sarana ADD dalam meningkatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. yaitu Kepala Desa, menggunakan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa PTPKD, dan Bendahara Desa Gunungsari diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dalam pembangunan yang terjadi di Desa Gunungsari yakni masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan selama ini apalagi pembangunan yang terjadi selama tahun 2016 belum terlaksanakan dengan sepenuhnya dan di rencanakan akan di laksanakan kembali pada tahun 2017 namun belum terlaksanakan dengan jelas dan juga informasi terkait dalam pembangunan yang selama ini, belum adanya kejelasan dari pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, serta lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dalam Pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dan informannya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, dan Warga/Masyarakat. Menggunakan data primer dan sekunder. hasil pengumpulan data melalui: *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, *interview* dan dokumentasi. analisis data menggunakan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. hasil data menggunakan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa gunungsari

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Gunungsari cukup terencana seperti yang terlihat pada tabel 9 tahap perencanaan desa Gunungsari diawali dengan rapat perdusun sampai dengan penyusunan RPD bersama pengurus kantor Desa Gunungsari dimana untuk membahas terkait dengan penggunaan anggaran ADD serta bagaimana proses pengelolaan ADD. Selain itu, dalam tahapan perencanaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat bahwa adanya partisipasi masarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Dana Desa, serta dalam proses musrembang. Pembangunan sosial menurut Midgley dalam Zainudin 2017: 3, Pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan yang terencana dalam didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan cara menggabungkannya melalui proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Selanjutnya, tahapan pelaporan pengelolaan ADD di Desa Gunungsari, dan hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pelaporan sangat baik, dapat terlihat dari bentuk pelaporan yang di bagi dalam dua tahap yakni laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD serta penerapan pelaporan yang sesuai dengan peraturan walokota Batu. Proses pembuatan dua laporan ini bisa dibilang sama namun yang menjadi pembedanya yakni pada lampiran laporan. Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Gunungsari, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung jawaban cukup baik, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh Pemerintah Desa Gunungsari berdasarkan Peraturan kota Batu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

a. faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Gunungsari dalam Pengelolaan ADD dalam penikatan pembagunan di Desa Gunungsari yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan tentang petunuk teknis Alokasi Dana Desa setiap tahun berubah

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah, hal ini menjadi kendala bagi aparat Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD. Peraturan teknis ADD yang berubah-rubah membuat aparat desa perlu belajar lagi dalam menyusun ADD sehingga hal seperti itu dapat membuat keterlambatan dalam pelaporan ADD di Desa Gunungsari.

2. Komunikasi

Dari hasil penelitian komunikasi juga merupakan salah satu faktor penghambat pengelolaan ADD, yang terlihat dari masarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat didepan umum sehingga pemerintah Desa Gunungsari kadang mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin disampaikan sehingga terlambatnya proses pembangunan yang akan dilaksanakan di desa gunungsari.

b. faktor pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam masyarakat di Desa Gunungsari antara lain sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungsar yang terlihat dari keinginan masyarakat dalam membantu menjalankan program Desa dan berdasarkan penelitian masyarakat sangat antusias untuk membantu serta bekerja sama dalam pelaksanaan program pemerintah Desa. Dengan demikian faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADD adalah respon masyarakat yang turut berpartisipasi.

2. Sarana dan Prasarana

Dari hasil penelitian sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ADD, yang mengupayakan pemerintah Desa Gunungsari demi terlaksananya program yang akan dijalankan dengan menyediakan kendaraan bagi aparat Desa dalam menjalankan tugasnya.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat peneliti, bahwa faktor yang menghambat Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Gunungsari Kecamatan Buniaji ini yaitu Sumber daya manusia bisa dikatakan sangat baik, jika dari kinerja aparat pemerintah Desa dalam mengurus pengelolaan yang sesuai. Cepat dan lambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh sumber daya manusia sebagai penggerak.

Faktor yang mendukung ADD dalam pembangunan Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji adalah Partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dapat mendukung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan implementasi program pembangunan.

Dapat disimpulkan faktor pendukung menurut hasil penulis lapangan dan teori-teori menurut para ahli bahwa partisipasi, tersedianya sarana prasana penunjang sumber daya manusia merupakan faktor-faktor keberhasilan sebuah pembangunan, semangat dan keingin tahuan masyarakat atas keterlibatan mereka didalam pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan di Desa Gunungsari.

KESIMPULAN

1. Proses Pengelolaan ADD terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. sedangkan proses dari pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan.
2. Factor yang mempengaruhi ADD yaitu pendukung dan penghambat. Yang mendukung Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa. Sedangkan faktor penghambat adalah petunjuk teknis ADD setiap tahun berubah dalam komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*.
- Zainudin Zahir. 2017. *Sorotan Literatur Dasar Sosial Dalam Pembangunan Komunitas Di Malaysia Dan Indonesia*. Deepublish.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Batu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa.